

## Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Upaya Pengembangan Budaya Literasi Konstitusi

Siti Darojah<sup>a, 1\*</sup>, Ikman Nur Rahman<sup>a, 2</sup>, Ronni Juwandi<sup>a, 3</sup>

<sup>a</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

<sup>1</sup> siti.darojah123@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 7 April 2021;

Revised: 21 April 2021;

Accepted: 1 Mei 2021.

Kata-kata kunci:

Peran Guru PPKn;

Literasi;

Konstitusi.

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya pengembangan budaya literasi konstitusi peserta didik di SMA Negeri 1 Kota Serang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menemukan bahwa adanya peran aktif dari guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya mengembangkan kegiatan literasi konstitusi yaitu dalam menyampaikan pengetahuan konstitusi, menanamkan nilai dan moral, mengkreasikan kegiatan literasi konstitusi, berkomunikasi dan bekerjasama dengan lingkungan sekolah dalam upaya pengembangan kegiatan literasi konstitusi. Penyebab terhambatnya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya pengembangan budaya literasi konstitusi antara kesibukan dan rasa malas peserta didik, kurangnya kerjasama antar guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan lainnya dalam membimbing peserta didik dalam kegiatan literasi konstitusi setiap minggunya, dan kurangnya kerjasama antara pihak sekolah dengan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terutama dalam penyediaan sarana prasarana di sekolah.

---

### ABSTRACT

*The Role of Pancasila and Citizenship Education Teachers in Efforts to Develop a Culture of Constitutional Literacy. This study aims to describe how the role of teachers of Pancasila and Citizenship Education in efforts to develop the culture of constitutional literacy of students at SMA Negeri 1 Serang City. This research is a qualitative descriptive research. Data collection techniques using interviews, observations, documentation, and literature studies. The results of the study found that there is an active role of teachers of Pancasila and Citizenship Education in an effort to develop constitutional literacy activities, namely in conveying constitutional knowledge, instilling values and morals, creating constitutional literacy activities, as well as communicating and cooperating with the school environment in an effort to develop constitutional literacy activities. The causes of the inhibition of teachers of Pancasila and Citizenship Education in efforts to develop a culture of constitutional literacy between the busyness and lazyness of learners, the lack of cooperation between teachers of Pancasila education and other nationalities in guiding learners in the activities of constitutional literacy every week, and the lack of cooperation between the school and teachers pancasila education and citizenship, especially in the provision of infrastructure in schools.*

---

Keywords:

*The Role of The Pancasila and Civics Teachers;*

*Literacy;*

*Constitution.*

Copyright © 2021 (Siti Darojah dkk). All Right Reserved

How to Cite: Darojah, S., Rahman, I. N., & Juwandi, R. (2021). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan Dalam Upaya Pengembangan Budaya Literasi Konstitusi. *Melior : Jurnal Riset Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia*, 1(1), 25–31. <https://doi.org/10.56393/melior.v1i1.128>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Pendidikan Nasional merupakan suatu harapan pelaksanaan pendidikan negara Indonesia, dalam rangka mencerdaskan masyarakat Indonesia, dari segi perubahan tingkahlaku yang sesuai dengan nilai dan moral yang berlaku, serta adanya perkembangan pola pikir, terutama dalam wawasan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga harapan dari pelaksanaan pendidikan tersebut, warga negara Indonesia bisa memiliki keseimbangan, antara kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dengan kemampuan dalam aspek sikap atau tingkah laku yang berkarakter. Dalam mencapai harapan dan tujuan tersebut dibutuhkan actor yang berfungsi menyampaikan materi pengetahuan dan mendidik peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter baik yaitu tenaga pendidik. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru memiliki fungsi dan kewajiban pokok sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing, selain itu pula guru harus mampu berperan dalam menggambarkan dan menampilkan teladan yang baik dalam pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksi sosial, bertutur kata, bertindak ataupun bersikap sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku serta peran guru lainnya harus menjadi motivator dalam meningkatkan minat peserta didik. Adapun menurut Sardiman (2011:10) bahwa peran guru sebagai motivator sangat penting dalam interaksi belajar mengajar karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang membutuhkan kemahiran sosial menyangkut performance dalam arti personalisasi dan sosialisasi diri.

Guru sebagai tenaga profesional selalu berusaha menjalankan tugas dan perannya dengan baik dan maksimal (Gultom, 2011). Begitu juga guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) harus mampu berperan aktif dalam memberi motivasi membuat peserta didik aktif, membuat sarana belajar yang menyenangkan serta teladan yang baik bagi peserta didik, selain itu juga peran guru lainnya berpengaruh dalam hal penambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi peserta didik, peserta didik sebagai seorang pelajar yang haus akan ilmu pengetahuan, akan banyak mencari sumber ilmu pengetahuan seluas-luasnya, tanpa harus menerima, mengandalkan serta menunggu informasi maupun ilmu pengetahuan baru yang disampaikan guru saja, dalam hal ini dibutuhkan kemandirian dari peserta didik dalam menggali ilmu pengetahuan, dengan cara melakukan kegiatan literasi salah satunya yaitu kegiatan membaca. Selaras dengan yang tercantum dalam Kompas.com (29/08/2016) menyatakan bahwa kondisi minat baca bangsa Indonesia memang cukup memperhatikan,

Berdasarkan studi Most Littered Nation the Word yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada maret 2016. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Indonesia berada di bawah Thailand (59) dan di atas negara-negara Eropa.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa minat membaca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, terbukti dari hasil penelitian di atas bahwa minat membaca bangsa Indonesia di tingkatan dunia berada di peringkat 60 dari 61 negara. Selaras dengan itu dalam Kemendikbud.go.id (30/03/2017) menjelaskan bahwa Data United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menunjukkan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia hanya 1 orang dari 1.000 penduduk yang memiliki minat baca (0,001). Penelitian hasil dari penelitian perpustakaan nasional mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia rata-rata membaca sekitar 2 sampai 4 jam per hari, di bawah standar UNESCO sekitar 4 sampai 6 jam per hari. Adapun masyarakat maju rata-rata meluangkan 6 sampai 8 jam per hari untuk membaca.

Minat membaca masyarakat Indonesia masih rendah dan penelitian di atas membuktikan dari 1000 orang masyarakat Indonesia hanya 1 orang yang memiliki minat membaca tinggi dan masih jauh dari standar ideal berkaitan dengan waktu membaca yang ditetapkan UNESCO, sehingga wawasan pengetahuan masyarakat Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara maju lainnya,

yang minat membaca tinggi dan budaya literasi juga sudah terlaksana dengan baik pula. Kebiasaan membaca sangat berpengaruh dalam keberlangsungan setiap manusia karena pengetahuan dan pengembangan daya pikir dan wawasan seseorang diperoleh dari kegiatan membaca. Membaca sangat erat kaitannya dengan konsep literasi dan kekritisan (Gultom, & Reresi, 2020).

Menurut Dewi Utama Faizah dkk (2016:2) literasi memiliki makna yang lebih luas literasi dapat diartikan sebagai kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam perkembangan literasi atau minat membaca yaitu faktor lingkungan yang mendukung, salah satu lingkungan sekolah yang merupakan penyelenggara pendidikan formal yang dapat memberikan motivasi terhadap peserta didik apabila adanya kegiatan literasi yang diselenggarakan dan diterapkan oleh para guru di sekolah sehingga dapat menciptakan suatu budaya literasi terhadap peserta didik, termasuk di dalamnya literasi konstitusi.

Berdasarkan pengamatan di SMA Negeri 1 Kota Serang saat praktik mengajar kurang lebih 2 bulan dan diperkuat dengan hasil pra penelitian dimulai pada tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 yang dilakukan setiap 1 minggu sekali pada hari jumat, ditemukan suatu keunikan dari peran dan tugas yang dilakukan oleh salah satu guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yaitu menggagas suatu kegiatan literasi konstitusi yang dilakukan setiap hari jumat sepulang sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PPKn tersebut menjelaskan, “latar belakang dibentuknya kegiatan ini kurang lebih lima tahun yang lalu ketika saya dinyatakan lolos menjadi guru PPKn di sekolah ini, ketika itu saya melihat beberapa peserta didik ke ruang guru konsultasi ke salah satu guru PPKn untuk menyiapkan materi dalam rangka persiapan lomba cerdas cermat mengenai pemahamannya terkait konstitusi, dimana pada saat itu beberapa peserta didik pulang sampai sore melakukan membaca, diskusi, dan hapalan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan lombanya akan dilaksanakan besok pagi, dari hal tersebut saya terinspirasi untuk mewadahi peserta didik dalam kegiatan literasi konstitusi, karena menurut saya pemahaman konstitusi tidak bisa dilatih hanya beberapa hari saja, perlu adanya kegiatan rutin setiap minggunya agar siswanya paham dan hapal isi konstitusi dan membutuhkan latihan rutin setiap minggunya dikemas dalam kegiatan literasi dimana selain awalnya kegiatan ini untuk persiapan perlombaan saja namun juga kegiatan ini lebih membiasakan peserta didik dalam membaca, memahami dengan kritis dan menghafal isi dari konstitusi.”

Adapun sumber referensi ataupun pedoman dalam kegiatan ini yaitu buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (dari amandemen 1-4), artikel ataupun berita terkini yang dijadikan bahan untuk diskusi serta kumpulan beberapa soal tentang pemahaman isi dari konstitusi. Keunikan dan kebaruan dari tugas dan peran guru PPKn lainnya selain penggerak dalam kegiatan literasi konstitusi diluar jam kegiatan pembelajaran di kelas, selain itu juga peranguru PPKn lainnya yaitu menciptakan pengembangan budaya literasi hingga tahap literasi tingkat pemahaman peserta didik terhadap isi konstitusi dan peserta didik juga mampu menjawab permasalahan yang diberikan guru dikaitkan ataupun dilandasi dengan hasil membaca, memahami dan hapalan konstitusi (UUD NRI 1945) sehingga peserta didik yang konsisiten mengikuti kegiatan ini paham dan hapal isi konstitusi.

Dari hasil pra penelitian, guru penggerak kegiatan tersebut menjelaskan bahwa beberapa peserta didik yang mengikuti kegiatan tersebut selain memiliki minat dan motivasi membaca konstitusi tinggi, peserta didik tersebut mampu komitmen mengikuti kegiatan tersebut setiap minggunya, walaupun tidak ada peraturan legal yang tertulis, yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut namun dalam hal sanksi peserta didik apabila tidak mengikuti kegiatan mingguan mereka harus menyotorkan hapalan dan menyampaikan hasil analisis nya terkait isi konstitusi kepada peserta didik minggu mendatang.

Komunikasi dan pendekatan yang kuat antara guru dan peserta didik dalam kegiatan ini memudahkan dalam pengembangan budaya literasi karena sering melakukan kegiatan diskusi yaitu merencanakan dan merancang kegiatan literasi minggu depannya, komunikasi sangat intensif baik secara langsung maupun tidak langsung (komunikasi di media sosial). Peserta didik yang mengikuti kegiatan tersebut aktif dalam mengikuti berbagai perlombaan yang berkaitan dengan pengetahuan konstitusi dan mendapatkan beberapa kejuaran, pada tahun 2015 beberapa peserta didik mengikuti perlombaan 4 Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh MPR dan hanya lolos pada tahap semi final di tingkat Provinsi Banten, Pada tahun 2016 mendapatkan juara ke-2 tingkat provinsi dalam perlombaan 4 Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Kesatuan bangsa dan politik kementerian dalam negeri (Kesbangpol), Pada tahun 2017 mendapatkan juara ke-1 tingkat provinsi dalam perlombaan 4 Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh MPR, Pada tahun 2018 mendapatkan juara ke-2 tingkat provinsi dalam perlombaan 4 Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol.

Dari permasalahan di atas sangat berperan guru PPKn tersebut dalam membentuk kegiatan pembiasaan membaca ataupun budaya literasi konstitusi (diluar kegiatan belajar mengajar) membaca konstitusi sampai batas memahami makna dapat memberikan wawasan pengetahuan serta pemahaman isi dari konstitusi (UUD NRI 1945) serta prestasi yang didapatkan oleh beberapa peserta didik yang mengikuti kegiatan tersebut seharusnya dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi peserta didik yang belum bergabung atau mengikuti kegiatan tersebut. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam terhadap masalah tersebut. Dari hasil penelitian itu, oleh peneliti ditungkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul “Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Upaya Pengembangan Budaya Literasi Konstitusi (Studi Deskriptif di SMA Negeri 1 Kota Serang).”

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan peran guru PPKn dalam pelaksanaan budaya literasi konstitusi peserta didik di SMA Negeri 1 Kota Serang, untuk mendeskripsikan upaya pengembangan budaya literasi konstitusi di SMA Negeri 1 Kota Serang dan untuk mendeskripsikan kendala dan solusi guru PPKn dalam pelaksanaan kegiatan literasi konstitusi di SMA Negeri 1 Kota Serang.

## Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya pengembangan budaya literasi konstitusi peserta didik di SMA Negeri 1 Kota Serang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Guru dan peserta didik SMA Negeri 1 Kota Serang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik, triangulasi sumber dan *member check*.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil temuan pertama terkait dengan peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pelaksanaan Budaya Literasi Konstitusi Peserta didik di SMA Negeri 1 Kota Serang. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi mengenai bagaimana peran guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam pelaksanaan budaya literasi konstitusi peserta didik sangat berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan literasi konstitusi di sekolah ini. Terlihat dalam tahap ataupun alur kegiatan budaya konstitusi yaitu tahap awal berlangsung pada tahun ajaran baru, dimana salah satu guru PPKn yang menggerakkan kegiatan literasi konstitusi tersebut memberikan serta melakukan sosialisasi ke setiap kelas (kelas 10 dan kelas 11) untuk mengikuti kegiatan literasi konstitusi kelas 11 itu anggota yang tetap dan aktif mengikuti kegiatan ini saat kelas 10. Tahap kedua semua

---

peserta didik yang berminat mengikuti kegiatan tersebut berkumpul setiap minggunya untuk berlatih, pertemuan pertama yaitu tahap pengenalan peserta didik diberikan penjelasan dan pemamaparan mengenai tahapan kegiatan setiap minggunya dan manfaat dari mengikuti kegiatan literasi sehingga memberikan motivasi untuk konsisten dan membiasakan siswa melakukan kegiatan literasi konstitusi.

Dari pertemuan kedua dan selanjutnya yaitu melakukan kegiatan rutin yaitu pertama, peserta didik diperintahkan membaca dan memahami isi dari konstitusi (UUD 1945) selama 15 sampai 25 menit. Kegiatan kedua peserta didik ditugaskan untuk menghafal isi konstitusi yang sudah ada targetan setiap minggunya, tahap ketiga peserta didik menyetorkan hapalan kepada guru dan melakukan diskusi menganalisis berita atau kasus yang telah guru sajikan. Tahap terakhir yaitu tahap refleksi dimana guru mengecek pemahaman peserta didik terhadap isi konstitusi tersebut dengan cara guru menyampaikan beberapa soal secara langsung kepada semua peserta didik, berkaitan dengan pemahamannya menganalisis makna dari setiap isi konstitusi.

Guru PPKn juga mengetes peserta didik berkaitan dengan hapalannya terhadap isi konstitusi, selama kegiatan berlangsung guru PPKn membiasakan peserta didik untuk melakukan kegiatan literasi konstitusi secara terus menerus tiap harinya (membaca, mengkritisi atau memahami substansi isi konstitusi dan menghafalkan isi konstitusi), selain itu juga peran guru PPKn sangat berpengaruh terhadap tingkat minat peserta didik mengikuti latihan setiap minggunya, terlihat ketika Guru PPKn berhalangan hadir maka peserta didik malas melakukan tahapan kegiatan literasi dan kadang meliburkan kegiatan ini apabila guru PPKn tidak bisa datang membimbing latihan, selain itu peran guru PPKn lainnya membiasakan disiplin, saat berdiskusi menghargai pendapat teman, serta guru PPKn juga berperan dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan lingkungan sekolah terkait meminta kritik saran dan informasi terkait perlombaan berkaitan 4 pilar.

Hal tersebut diperkuat oleh teori menurut Mcleod dalam penelitian Nurul Widianti (2017:18) yaitu menularkan pengetahuan dan kebudayaan kepada orang lain, menanamkan nilai-nilai moral dan keyakinan kepada orang lain, mampu dan dapat menguasai/mengembangkan materi-materi bahan ajar, berkomunikasi dengan baik serta dapat bertanggung jawab dan dapat bekerjasama dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu juga guru PPKn dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip dasar literasi yaitu selaras dengan teori Menurut Kern dalam Ibadullah M. dkk (2017:6) prinsip Interpretasi, prinsip kolaborasi prinsip Konvensi, prinsip pemecahan masalah, prinsip penggunaan bahasa dan prinsip refleksi.

Hasil temuan kedua terkait dengan upaya pengembangan budaya literasi konstitusi di SMA Negeri 1 Kota Serang. Pihak sekolah maupun bagi guru pembina ataupun penggerak dalam kegiatan ini, dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara berbagai aktor yang ada dalam lingkungan atau masyarakat sekolah dalam mengembangkan serta meningkatkan kegiatan literasi konstitusi. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017:6) menjelaskan bahwa dalam mengembangkan kegiatan literasi konstitusi harus mengacu pada prinsip pengembangan literasi sekolah. berdasarkan temuan dilapangan di dapatkan fakta sebagai berikut yaitu prinsip keutuhan dan menyeluruh (holistik), prinsip Keterpaduan (terintegrasi), prinsip keberlanjutan, prinsip kontekstualitas dan prinsip responsif lokal.

Adapun di SMA Negeri 1 Kota Serang menggunakan prinsip pengembangan literasi yaitu prinsip keutuhan dan Kemenyeluruhan (Holistik) adapun bentuk kegiatannya Guru PPKn sosialisasi ke setiap kelas agar peserta didik ikut dalam kegiatan literasi konstitusi, prinsip keterpaduan (terintegrasi) kegiatan di sekolah tersebut Guru PPKn Kegiatan yang sistematis terdiri beberapa tahapan (tahap membaca, memahami, menghafal, setoran hapalan, diskusi dan refleksi), Prinsip Keberlanjutan (sustainability) kegiatannya Guru PPKn konsisten membimbing, mengitruksikan peserta didik seminggu sekali pada hari jumat sepulang sekolah.

Adapun hasil wawancara menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kerjasama anatara setiap para guru yang menagajar mata pelajaran PPKn dalam hal memberikan sosialisasi untuk mengikuti kegiatan literasi konstitusi tiap minggunya, selain itu juga perlu adanya penegasan

penargetan tiap minggunya yaitu dengan dibuatnya buku pedoman ataupun perkembangan peserta didik tiap minggunya karena berdasarkan temuan walaupun pun guru mengarahkan tujuan tiap minggunya tapi masih saja ibu belum tegas memberikan targetan kepada peserta didik untuk pencapaiannya tiap minggunya, selanjutnya perhatian lebih dari pihak sekolah terutama dalam hal informasi terbaru mengenai penyelenggaraan perlombaan, serta pemberian anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan literasi konstitusi dan juga perlu adanya kerjasama yang lebih aktif di antaranya guru PPKn lainnya di sekolah ini dalam mengembangkan kegiatan literasi konstitusi.

Temuan ketiga, yaitu kendala dan solusi guru PPKn dalam pelaksanaan kegiatan literasi konstitusi di SMA Negeri 1 Kota Serang. Dalam pelaksanaan kegiatan pasti adanya suatu kendala ataupun hambatan, begitu pula dalam pelaksanaan kegiatan literasi konstitusi terdapat berbagai hambatan yang dihadapi dalam melakukan proses pengembangan budaya literasi konstitusi dari kendala internal maupun kendala eksternal. Dari aspek internal adalah yaitu dari dalam diri sendiri, ketika dia sudah lelah untuk mencapai pemikiran, sudah lelah membimbing kegiatan serta banyaknya tugas lain di sekolah yang berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan literasi sehingga harus ada yang direlakan untuk meliburkan kegiatan literasi konstitusi, dan juga ada perasaan bosan dengan keadaan kegiatan yang belum terlihat perkembangan sehingga di situlah masa-masa kita tidak percaya lagi dengan namanya perjuangan untuk berproses mengembangkan.

Kendala lainnya yaitu dari aspek eksternal di mana kendala di luar dari diri atau pribadi guru PPKn yang menyelenggarakan kegiatan tersebut, yang pertama yaitu kendala dari peserta didik dalam hal tingkat kemalasan peserta didik dalam hal latihan karena merasa banyak tugas sekolah lainnya, kesibukan peserta didik yang mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya dimana pelaksanaan latihannya bersamaan yaitu hari jumat sepulang sekolah, terkadang siswa juga tidak bisa mengikuti kegiatan literasi konstitusi karena memilih ekstrakurikuler lainnya, peserta didik juga terkadang minat untuk membaca dan menghafal kurang karena beberapa peserta lebih menyukai diskusi dan berlatih *public speaking* atau berdebat satu sama lainnya.

Kendala eksternal lainnya yaitu dari pihak sekolah terkait kurangnya pemberian informasi perlombaan seputar lomba-lomba tentang konstitusi sehingga terkadang peserta didik merasakan kecewa terlewatkan tidak bisa mengikuti ajang perlombaan. Dari berbagai kendala yang dikemukakan diatas solusi yang diberikan guru PPKn sebagai pembina dan penggerak kegiatan literasi konstitusi yang pertama untuk menjawab kendala internal solusinya harus mengingat kembali tujuan awal dibentuknya kegiatan tersebut sehingga ada motivasi dan semangat yang tinggi lagi untuk berjuang mengembangkan kegiatan literasi konstitusi sehingga terwujudnya budaya baca konstitusi yang tinggi di sekolah ini.

Adapun solusi yang diangkat dalam untuk menjawab kendala eksternal dari peserta didik yang pertama perlu adanya motivasi lebih dari guru Pembina agar peserta didik tidak merasakan malas dan pusing mengikuti kegiatan literasi dikarenakan banyak tugas sekolah lainnya, disanalah dibutuhkan peran guru untuk membangkitkan semangat peserta didik, peserta didik juga fokus mengikuti kegiatan tersebut disarankan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler satu saja agar memiliki pemusatan pemikiran yang kuat danantisipasi juga bilamana adanya penyelenggaraan lomba bersamaan, solusi terakhir untuk pihak sekolah untuk lebih aktif lagi dalam mencari informasi dan *link* pelaksanaan perlombaan tentang konstitusi dan harus adanya komunikasi langsung beberapa bulan sekali untuk meminta saran ataupun membicarakan finansial tentang pengembangan budaya literasi konstitusi.

## Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai Peran Guru PPKn dalam upaya pengembangan budaya literasi konstitusi peserta didik dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, peran guru PPKn dalam upaya pengembangan budaya literasi konstitusi peserta didik di SMA Negeri 1 Kota Serang sangat berperan. Peran Guru PPKn meliputi menularkan ilmu pengetahuan, menanamkan nilai-nilai moral, kreatif dalam mengembangkan kegiatan literasi, berkomunikasi dengan baik serta dapat bertanggung jawab dan juga dapat bekerjasama dengan lingkungan sekitarnya dengan baik, dalam

---

proses pelaksanaan kegiatan literasi guru PPKn menerapkan prinsip dasar literasi di antaranya prinsip interpretasi, prinsip kolaborasi, prinsip konvensi, prinsip pengetahuan kultural, prinsip pemecahan masalah, prinsip refleksi. Pelaksanaan kegiatan literasi konstitusi di SMA Negeri 1 Kota Serang termasuk dalam model membaca metakognitif karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahap kegiatan dengan tujuan untuk memberikan efek positif kepada pemahaman seseorang sebab dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan baik terkait konstitusi maupun wawasan umum lainnya. Kegiatan literasi ini juga termasuk dalam jenis budaya literasi tinjauan buku, dalam kegiatan literasi ini peserta didik harus membaca konstitusi dengan seksama untuk dapat memahami maksud dari isi konstitusi. Kedua, hasil dari peran guru PPKn dalam mengembangkan kegiatan literasi konstitusi memberikan manfaat khususnya bagi peserta didik yang mengikuti kegiatan ini yaitu paham dan hapal isi dari konstitusi, selalu peka terhadap berita terkini dan berani untuk berpendapat dalam forum diskusi serta manfaat lainnya setiap tahunnya peserta didik menyumbangkan prestasi kejuarannya kepada sekolah.

### Referensi

- Djamarah, Bahri Syaiful. 2010. Guru dan Anak dalam interaksi edukatif. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Faizah, Dewi Utami dkk. (2016). Panduan Gerakan Literasi Sekolah Dasar. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud. RI Kementrian Pendidikan dan
- Gultom, A. F. (2011). Guru Bukan Buruh. Malang: Servaminora.
- Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada RUU Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 38-47. <http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8497>
- Kebudayaan. 2017. Materi Pendukung Baca Tulis. Jakarta Timur: TIM GLN Kemendikbud.
- Kompas.com. (2016). Minat Baca Indonesia Ada di Urutan ke-60 Dunia. Diakses pada tanggal 27 Januari 2019 pukul 22:44WIB, dari <https://edukasi.kompas.com/read/2016/08/29/07175131/minat.baca.indonesia.ada.di.urut.ke-60.dunia>
- Malawi, Ibadullah Dkk. (2017). Pembelajaran Literasi Berbasis Sastra Lokal. Jawa Timur: Cv. Ae Media Grafika. Diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 19:52WIB, dari <https://books.google.co.id/books?id=biBzDwAAQB,2017>, Tidak diterbitkan). QJ&printsec=frontcover&dq=Pe
- Mutmainah, D., & Kamaluddin, K. (2018). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Sikap Dan Kepribadian Siswa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 45-54.
- Wontami, F. (2016). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Perilaku Agresif Peserta Didik di SMA Negeri 4 Gorontalo. *Skripsi*, 1(221411116).
- Wuryan, Sri & Syaifullah (2015). Ilmu Kewarganegaraan Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.